

## PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DESA WISATA

Tahrizi Fathul Aliim<sup>1</sup>, Rudi Saprudin Darwis<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Indonesia, 45363

Email: [tahrizi19001@mail.unpad.ac.id](mailto:tahrizi19001@mail.unpad.ac.id), [rudi.darwis@unpad.ac.id](mailto:rudi.darwis@unpad.ac.id)

*Submitted : 12 Desember 2023; Accepted : 09 Februari 2024, Published: 10 Februari 2024*

### ABSTRAK

Sebagai salah satu negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak, Indonesia memiliki peluang besar untuk memajukan ekonomi negara melalui bidang pariwisatanya. Melalui artikel ini, penulis akan membahas bagaimana kelembagaan lokal dapat menjadi sebuah awalan yang baik bagi suatu negara untuk mengembangkan perekonomiannya hingga menciptakan kesejahteraan sosial. Penulis menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka sebagai metode penyusunan artikel. Penulis juga menggunakan 3 (tiga) teori: *Community Development Theory*, *Community Based Tourism Theory*, serta *Social Capital Theory* sebagai dasar elaborasi atas pemikiran-pemikiran yang akan dituliskan pada bagian pembahasan. Hasil dari kajian literatur yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa kelembagaan lokal dalam sektor pariwisata memegang peranan yang besar. Kelembagaan lokal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di desa wisata, mengembangkan ekonomi lokal, serta membentuk sebuah pembangunan sosial yang berkelanjutan. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni kelembagaan lokal dapat meningkatkan upayanya dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur, mempromosikan praktik pariwisata ke kancah internasional, serta memperluas pendidikan pariwisata di sekolah menengah.

**Kata Kunci:** Kelembagaan Lokal, Pendayagunaan, Sumber Daya, Desa Wisata.

### ABSTRACT

*As one of the countries with a very large number of islands, Indonesia has a great opportunity to advance the country's economy through its tourism sector. Through this article, the author will discuss how local institutions can be a good start for a country to develop its economy to create social welfare. The author uses the method of literature study or literature review as a method of preparing articles. The author also uses 3 (three) theories: *Community Development Theory*, *Community Based Tourism Theory*, and *Social Capital Theory* as the basis for elaborating the thoughts that will be written in the discussion section. The results of the literature review conducted by the author show that local institutions in the tourism sector play a large role. Local institutions can increase community participation in tourist villages, develop the local economy, and form a sustainable social development. Suggestions that can be given by the author are that local institutions can increase their efforts by working with the government to develop infrastructure, promote tourism practices to the international arena, and expand tourism education in secondary schools.*

**Keywords:** *Local Institutions, Utilization, Resources, Tourism Villages*

## PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa contoh bentuk kontribusi pariwisata terhadap pengembangan ekonomi suatu negara yakni menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan membantu pengembangan bisnis lokal (Rusyidi & Fedryansah, 2018).

Menurut *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata telah mendapat banyak perhatian sebagai wadah potensial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, pengembangan pariwisata seringkali dikaitkan dengan beberapa dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, eksploitasi budaya, bahkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, untuk mencegah dampak negatif tersebut, kehadiran kelembagaan lokal menjadi salah satu jalan keluar karena dapat memitigasi dampak tersebut dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya di desa wisata (Rani, F., et al., 2015). Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran yang dimainkan oleh kelembagaan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kelembagaan lokal berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan di desa wisata.

Melalui artikel ini, penulis akan melakukan pengkajian atas peran institusi atau lembaga lokal dalam mengkoordinasikan penggunaan sumber daya di desa wisata dan bagaimana hal tersebut bisa menciptakan kesejahteraan sosial dari sudut pandang pembangunan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Desa wisata memiliki potensi sumber daya alam, budaya, dan sosial yang kaya. Namun tanpa pengelolaan yang baik, sumber daya ini dapat terkuras, budaya dapat terkikis, dan lingkungan dapat terganggu. Oleh karena itu, memahami peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya desa wisata menjadi penting untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan menjaga daya tarik desa wisata dalam jangka panjang. Kelembagaan lokal dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan sektor ekonomi ini dengan memfasilitasi pelatihan, pemasaran, pengembangan produk, dan keterlibatan masyarakat lokal. Mengkaji peran kelembagaan lokal dapat membantu

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi yang efektif untuk memperkuat kontribusi ekonomi desa wisata.

Kelembagaan lokal pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dalam lokalitas tertentu untuk melayani kebutuhan anggotanya. Lembaga-lembaga lokal sendiri dapat bervariasi bentuknya contohnya seperti institusi pemerintah, organisasi nirlaba, bisnis, atau bahkan lembaga pendidikan. Lembaga lokal menyediakan layanan sosial bermanfaat bagi komunitas lokal, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan keamanan publik. Tujuan utama berdirinya sebuah lembaga lokal adalah guna memenuhi kebutuhan komunitasnya secara khusus serta menciptakan kesejahteraan didalamnya (Huda, 2020).

*The Overseas Development Institute* (ODI) pun memaparkan pemahamannya mengenai lembaga lokal yakni sebagai grup individu dan organisasi yang membentuk bagian berdasarkan tatanan sosial masyarakat, serta memiliki struktur dan proses formal atau informal untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber dayanya (Tanner, T., et al., 2015).

Kemudian terdapat pula pengertian kelembagaan lokal yang didefinisikan oleh *The International Labour Organization* (ILO), dimana lembaga lokal merupakan gabungan antara organisasi, jaringan, dan hubungan yang membuka peluang untuk masyarakat dalam mengambil tindakan kolektif sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka (Baccini, L., et al., 2014).

Dengan demikian, kelembagaan lokal merupakan komponen penting dari pembangunan berkelanjutan dari berbagai bidang. Topik kelembagaan lokal dalam mengkoordinasikan pemberdayaan sumber daya di desa wisata menjadi krusial dan meningkatkan urgensi untuk para peneliti untuk meneliti lebih lanjut karena penelitian ini dapat membantu memahami peran lembaga lokal dalam mengelola sumber daya alam dan budaya, mengembangkan infrastruktur pariwisata, dan memastikan bahwa manfaat pariwisata didistribusikan secara merata atau adil kepada masyarakat lokal. Penelitian ini dapat mencari tahu bagaimana koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga lokal untuk menciptakan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih & Nugraha (2018) menyatakan

bahwa kelembagaan lokal memiliki peran yang besar dalam mengembangkan desa wisata. Pengembangan desa wisata ini memiliki dampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat lokal, yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat lokal, terdapat banyak usaha baru yang bermunculan yang berkembang karena adanya desa wisata. Maria & Darwis (2022) menyatakan bahwa pendayagunaan sumber daya lokal mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk pengembangan program desa wisata yang berdasarkan pada kemampuannya masing-masing. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Tou, & Eriawan (2020) yang menyatakan bahwa kelembagaan lokal berperan cukup banyak dalam proses pengembangan wisata budaya.

Penelitian mengenai topik peran kelembagaan lokal ini menjadi sebuah urgensi juga karena peneliti dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi tantangan baik yang belum pernah ataupun sudah pernah terjadi secara langsung pada lembaga lokal selama memaksimalkan peran pendayagunaan sumber daya di desa wisata. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang peran lembaga lokal dalam mempromosikan keberlanjutan, dan dapat memberikan wawasan tentang potensi pariwisata sebagai alat pengembangan masyarakat dan pengontrol isu-isu lokal seperti kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian tentang peran kelembagaan lokal dalam pendayagunaan sumber daya di desa wisata sangat dibutuhkan untuk berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai pengembangan masyarakat dan pembangunan desa wisata. Desa wisata memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya desa wisata menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Setiap desa wisata memiliki konteks dan kekhasan masing-masing. Maka dari itu, pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan harus mempertimbangkan bahwa penguatan kelembagaan lokal perlu dijadikan prioritas guna menyediakan salah satu sarana pencipta kesejahteraan sosial di suatu wilayah.

## METODE

Penulis menggunakan metode studi literatur yang diperoleh dari kurang lebih 27 artikel dan jurnal yang dapat diakses melalui *Publish or*

*Perish*, Garuda, *Google Scholar* dan *Research Gate*. Analisis yang penulis lakukan didasari oleh sudut pandang teori yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat melalui ekonomi lokal di desa wisata. Fink (2014) mengatakan bahwa studi atau tinjauan literatur bisa dikatakan sebagai metode yang sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis kumpulan karya yang sudah selesai dan direkam yang dihasilkan oleh peneliti, sarjana, dan praktisi.

Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memperdalam studi yang relevan yang telah dilakukan pada topik pilihan penulis, termasuk dari teori, konsep, serta temuan penelitian terdahulu. Dalam kasus mempelajari peran kelembagaan lokal dalam mengkoordinasikan pendayagunaan sumber daya di desa wisata, tinjauan pustaka akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang ada tentang topik tersebut. Tinjauan pustaka membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada (Al-khaldi & Al-jamal, 2016). Topik peran lembaga lokal dalam pendayagunaan sumber daya desa wisata merupakan bidang penelitian yang mendapat perhatian terbatas dalam literatur yang ada. Oleh karena itu, melakukan tinjauan pustaka dapat membantu meningkatkan urgensi lebih lanjut di bidang ini (Haddow, et al., 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Gursoy, et al., (2018), lembaga-lembaga lokal dapat meningkatkan kualitas layanan pariwisata dengan mempromosikan pelestarian warisan budaya, kelestarian lingkungan, dan kewirausahaan lokal. Pendekatan ini juga dapat mengarah pada penciptaan citra positif destinasi, menarik lebih banyak wisatawan, dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Maka dari itu, penulis mengkombinasikan pemahaman tersebut dengan beberapa teori terkait guna membuat pembahasan yang lebih kompleks. Berikut beberapa pendekatan teori yang penulis terapkan untuk memaksimalkan pemahaman mengenai artikel ini:

### 1. *Community Development Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa tercapainya pembangunan ekonomi dapat direalisasikan melalui inisiatif berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat. Pendekatan ini relevan pada topik

artikel karena menekankan pentingnya membangun kemitraan antara pemerintah daerah, organisasi swasta, dan anggota masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan menghadapi segala resiko dan peluang ekonomi yang ada pada suatu wilayah. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang ekonomi dari wilayah tertentu dan memberdayakan individu untuk mengatasinya (Rahayu, et al., 2022).

## 2. *Community-based Tourism (CBT) Theory*

Teori *Community-based Tourism* atau Pariwisata Berbasis Masyarakat berfokus pada pentingnya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Teori CBT ini melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan pariwisata, dan memprioritaskan kesejahteraan turis serta penduduk (Purmada, et al., 2016). Teori CBT menjadi sangat relevan dengan topik artikel ini karena memperlihatkan bahwa dasar dari teori ini dapat membantu lembaga lokal menjadi fasilitator yang baik untuk masyarakat lokal karena dapat menentukan rencana awal hingga mekanisme pengoperasian layanan kelembagaan secara sistematis.

## 3. *Social Capital Theory*

Teori ini berpendapat bagaimana pentingnya hubungan sosial, jaringan, dan kepercayaan dalam menciptakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks desa wisata, teori ini menyatakan bahwa keberhasilan inisiatif pariwisata bergantung pada kekuatan hubungan sosial yang ada antara penduduk lokal, turis, serta pemangku kepentingan industri pariwisata. Lembaga lokal, seperti dinas pariwisata dan lembaga kemasyarakatan desa, dapat menjalankan peran utama dalam membangun modal sosial dengan memfasilitasi interaksi antara kelompok yang beragam dan mempromosikan rasa kebersamaan. Teori ini menekankan pentingnya hubungan dan jaringan sosial dalam pengembangan pariwisata (Kusuma & Darwanto, 2015).

### **Fungsi Kelembagaan Lokal**

Terdapat beberapa manfaat dan fungsi penting kelembagaan lokal bagi wilayah sekitarnya, antara lain yakni:

Pertama, *The Overseas Development*

*Institute* (ODI) menjelaskan bahwa kelembagaan lokal memegang salah satu fungsi penting yakni mampu meredakan konflik lokal. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga lokal seringkali berada pada “kutub positif” sehingga mampu memiliki informasi mengenai akar penyebab konflik lalu mengatasinya, contohnya masalah-masalah seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Institusi lokal dapat mempromosikan layanannya sebagai resolusi konflik dengan menyatukan berbagai kelompok untuk saling berbagi pemahaman (Tanner, T., et al., 2015).

Kedua, kelembagaan lokal yang kuat dapat membantu merealisasikan pembangunan sosial yang inklusif serta berkelanjutan melalui cara yang memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak suara pada pengambilan keputusan atas layanan-layanan yang nantinya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat lokal tersebut. Hal ini akan berkaitan dengan efektivitas kinerja lembaga lokal karena mereka harus bertanggung jawab kepada komunitas yang mereka layani. Menurut laporan *United Nations Development Program* (UNDP), lembaga-lembaga lokal harus bertanggung jawab kepada konstituen mereka, memiliki kapasitas untuk memberikan layanan secara efektif, dan transparan dalam operasi mereka. Maka dari itu, kelembagaan lokal harus membuat sebuah mekanisme pengawasan serta evaluasi untuk memastikan efektivitas, transparansi, serta partisipasi atas pemberian layanannya (Prakitri, et al., 2016).

Ketiga, selain menciptakan kesejahteraan sosial, lembaga lokal pun juga berfungsi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut sebuah studi oleh *International Labour Organization* (ILO), lembaga-lembaga lokal memegang peranan penting dalam mempromosikan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan. Lembaga lokal dapat membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan bisnis, memberikan pelatihan dan dukungan bagi pengusaha, dan mempromosikan investasi lokal (Baccini, L., et al., 2014).

Keempat, kelembagaan lokal juga berfungsi untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Menurut sebuah laporan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga lokal dapat menjadi langkah awal negara dalam memulai pencapaian atas poin-poin yang tertera pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan iklim,

konservasi keanekaragaman hayati, dan penggunaan lahan berkelanjutan. Lembaga lokal dapat mempromosikan manajemen sumber daya yang *sustainable*, mengelola energi yang dapat diperbaharui secara baik, dan mengajarkan bagaimana praktik penggunaan lahan yang efektif dan berkelanjutan. (Muna, 2023).

## Peran Kelembagaan Lokal dalam Pendayagunaan Sumber Daya Desa Wisata

Setelah memahami mengenai teori-teori pendekatan serta fungsi kelembagaan lokal, selanjutnya penulis membagi pembahasan artikel ini dengan memaparkan peran-peran kelembagaan lokal dalam mengkoordinasikan pendayagunaan sumber daya desa wisata, berikut penjelasannya:

### 1. Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Menurut laporan dari *International Institute for Sustainable Development*, lembaga lokal sangat penting untuk pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Laporan tersebut menyatakan bahwa lembaga lokal dapat memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki suara dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya alam, serta juga bekerja untuk mempromosikan praktik yang berkelanjutan dan memastikan bahwa manfaat sumber daya alam dibagi secara adil di antara semua anggota masyarakat.

Dalam teori *community development* yang membahas tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam. Kelembagaan lokal dapat memainkan peran penting dalam memobilisasi masyarakat, mengkoordinasikan upaya bersama, dan membangun kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori ini, kelembagaan lokal dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam upaya konservasi (Chigbu, 2014).

Pada teori *Community-based Tourism* (CBT) menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Kelembagaan lokal dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat lokal, pelaku pariwisata, dan pemerintah dalam mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mereka dapat membantu

memastikan bahwa pengembangan pariwisata didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, serta melibatkan mereka dalam manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan (Prakoso et al., 2020)

Dalam hal ini, kelembagaan lokal dapat melakukan beberapa upaya seperti menerapkan proses daur ulang sumber daya alam untuk mengurangi limbah dan melestarikan sumber daya alam. Penerapan proses daur ulang sumber daya alam oleh kelembagaan lokal dalam desa wisata memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi limbah dan melestarikan sumber daya alam. Daur ulang menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Kelembagaan lokal dalam desa wisata dapat memainkan peran kunci dalam mengarahkan dan memfasilitasi kegiatan daur ulang di tingkat komunitas. Dengan mengurangi limbah melalui daur ulang, desa wisata dapat mengurangi beban pada tempat pembuangan akhir dan menghindari pencemaran lingkungan. Selain itu, melalui penerapan daur ulang, desa wisata dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara lokal dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya baru. Hal ini membantu menjaga keberlanjutan desa wisata dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan alam yang menjadi daya tarik wisata. Selain manfaat lingkungan, daur ulang juga menciptakan peluang ekonomi lokal dengan mengembangkan program dan usaha daur ulang yang melibatkan masyarakat setempat. Ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan perekonomian lokal, sambil tetap memprioritaskan keberlanjutan. Dengan demikian, penerapan proses daur ulang sumber daya alam oleh kelembagaan lokal dalam desa wisata merupakan langkah yang penting dalam meminimalkan limbah, melestarikan sumber daya alam, dan membangun masyarakat yang berkelanjutan. Misalnya, daur ulang kertas dan plastik mengurangi kebutuhan bahan baku dari alam serta mengurangi konsumsi energi. Lembaga lokal juga bisa berupaya untuk berinvestasi pada sumber energi dari alam yang dapat diperbaharui seperti angin, matahari, dan tenaga air karena dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan seperti minyak, gas, dan batu bara.

Pada teori *Social Capital Theory* menekankan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial dalam membangun

kerjasama dan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelembagaan lokal dapat berperan dalam membangun modal sosial antara masyarakat, organisasi, dan pemerintah dalam upaya pendayagunaan sumber daya alam. Dengan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya, kelembagaan lokal dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sumber daya, serta meningkatkan kapasitas kolektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kelembagaan lokal juga dapat berperan dalam mendukung upaya konservasi dengan melindungi habitat dan spesies yang terancam punah dapat membantu menjaga kesehatan dan produktivitas sumber daya alam. Upaya-upaya diatas dibentuk guna masyarakat lokal maupun para wisatawan dapat merasakan manfaat yang maksimal dan adil tanpa mengeksploitasinya habis-habisan.

## 2. Pendayagunaan Sumber Daya Sosial dan Budaya

Adanya kontribusi dari kelembagaan lokal dalam mengkoordinasi pemanfaatan sumber daya lokal guna mengembangkan desa wisata secara tidak langsung dapat membuka sebuah mobilitas baru dalam lingkup masyarakat lokal sehingga mampu menciptakan dampak positif terhadap proses sosial yang terjadi di sebuah desa wisata (Maria & Darwis, 2022). Lebih lanjut, penulis akan memaparkan secara khusus bagaimana kelembagaan lokal berperan sebagai koordinator pendayagunaan sumber daya sosialnya.

Teori *community development* dapat digunakan untuk menganalisis peran kelembagaan lokal dalam pendayagunaan sumber daya sosial dan budaya dengan menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Kelembagaan lokal dapat berperan sebagai agen dalam memobilisasi masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya sosial dan budaya yang ada. Mereka dapat membantu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya sosial dan budaya, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya tersebut, dan membangun kapasitas masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya dan praktik sosial yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori pengembangan masyarakat, kelembagaan lokal dapat membantu mencapai pendayagunaan sumber daya sosial dan budaya

yang berkelanjutan, melindungi identitas budaya masyarakat, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.

Teori *Community-based Tourism* (CBT) juga relevan dalam menganalisis peran kelembagaan lokal dalam pendayagunaan sumber daya sosial dan budaya karena menekankan pada pengembangan pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melindungi warisan budaya. Kelembagaan lokal dapat berperan sebagai pengelola destinasi pariwisata yang mempromosikan praktik pariwisata yang berkelanjutan dan mempertahankan keunikan budaya masyarakat lokal. Mereka dapat membantu mengatur akses ke sumber daya sosial dan budaya, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori pariwisata berbasis masyarakat, kelembagaan lokal dapat membantu memastikan pendayagunaan sumber daya sosial dan budaya yang berkelanjutan, melindungi warisan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Teori *Social Capital Theory* memiliki relevansi penting dalam menganalisis peran kelembagaan lokal dalam pendayagunaan sumber daya sosial dan budaya karena menyoroti pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial dalam membangun kerjasama dan koordinasi dalam masyarakat. Kelembagaan lokal dapat berperan dalam membangun modal sosial yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya sosial dan budaya secara berkelanjutan. Mereka dapat memfasilitasi kerjasama antara aktor-aktor lokal, memperkuat kepercayaan, dan membangun norma sosial yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya sosial dan budaya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori modal sosial, kelembagaan lokal dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pendayagunaan sumber daya sosial dan budaya yang berkelanjutan, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sumber daya antara masyarakat lokal, dan meningkatkan kapasitas kolektif untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya sosial dan budaya secara bijaksana.

## 3. Kelembagaan Lokal sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat Desa Wisata

Pembangunan desa wisata berbasis

partisipasi masyarakat merupakan pembangunan yang dimulai dari kesadaran masyarakat setempat, dimana timbul urgensi dalam diri masing-masing warga setempat tanpa adanya paksaan dari pihak eksternal (Mubarok, et al., 2020). Lalu, menurut Kim, et al., inisiatif *Community-based Tourism* (CBT) yang diterapkan oleh kelembagaan lokal di Indonesia dapat meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata (2019).

Peran kelembagaan lokal sebagai penggerak partisipasi masyarakat desa wisata sendiri dapat mendorong adanya inklusi sosial. Inklusi sosial adalah proses memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Lembaga lokal memiliki posisi yang lebih baik untuk mempromosikan inklusi sosial karena lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan mereka (Sidiq & Resnawaty, 2017). Misalnya, lembaga lokal mengembangkan salah satu layanan khusus yang didalamnya mereka mengalokasikan sumber daya untuk kelompok masyarakat yang secara tradisional terpinggirkan, seperti perempuan, minoritas, atau penyandang disabilitas. Dengan demikian, lembaga lokal dapat memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya yang dapat membantu mereka berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakat.

Peran kelembagaan lokal penggerak partisipasi masyarakat ini tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga memberikan pengalaman wisata yang unik dan otentik bagi wisatawan. Lembaga lokal berfungsi sebagai perantara yang mengkoordinasi kerja sama antara wisatawan dan masyarakat lokal, memastikan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan dan menguntungkan ekonomi lokal berjalan dengan baik (Gursoy, et al., 2018).

Sebagai contoh, pada konteks ini, asosiasi pariwisata lokal Indonesia dapat membentuk sebuah pameran UMKM yang dikhususkan kepada kelompok pegiat ekonomi lokal di desa wisata untuk berjualan di tempat-tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Dengan menghususkan pameran ini kepada kelompok pegiat ekonomi lokal, desa wisata dapat memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk mereka kepada wisatawan yang sering mengunjungi tempat-tempat tersebut. Hal ini tidak

hanya memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memperluas akses pasar bagi produk lokal yang unik dan beragam. Pengunjung wisata akan merasakan pengalaman yang lebih kaya dengan memiliki lebih banyak pilihan produk lokal yang mencerminkan kebudayaan dan kekayaan desa wisata. Selain itu, pameran ini juga dapat menjadi *platform* bagi kelompok pegiat ekonomi lokal untuk berinteraksi langsung dengan wisatawan, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap produk lokal serta budaya desa. Melalui pameran UMKM ini, asosiasi pariwisata lokal Indonesia dapat berperan sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan pengalaman wisata yang lebih berarti dan autentik. Sebagai upaya yang lebih maksimal, lembaga lokal dapat membantu para pelaku UMKM untuk menerima pelatihan atau pembelajaran bagaimana menjadi memperlakukan seorang *customer* dengan baik atau cara untuk meningkatkan kualitas produk. Contoh tersebut pun menjadi bukti bagaimana kelembagaan lokal memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa wisata yakni dengan menciptakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

#### 4. Kelembagaan Lokal sebagai Penggerak Ekonomi Lokal Desa Wisata

Salah satu upaya pengembangan masyarakat dapat mencakup program pembukaan lapangan kerja melalui UMKM atau dana investasi lokal yang semuanya bertujuan untuk memberdayakan individu dan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan tangguh. Lembaga lokal sebagai koordinator pemanfaatan sumber daya dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat. Institusi lokal dapat membantu mempromosikan pembangunan ekonomi lokal dengan mengidentifikasi peluang pertumbuhan ekonomi, seperti usaha kecil atau industri lokal. Dengan menyediakan peluang bisnis untuk masyarakat lokal desa wisata, lembaga lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat (Meyer & Meyer, 2015).

Sebagai contoh, kelembagaan lokal memfasilitasi permintaan masyarakat dengan memberikan izin atas penyelenggaraan kegiatan berbasis pariwisata seperti pembuatan penginapan di lokasi tertentu, produksi kerajinan tangan, atau

pertunjukan budaya. Hal ini dapat menghasilkan pendapatan baru atau bahkan meningkatkan badan usaha milik masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya.

Selain lebih mendorong partisipasi masyarakat, kelembagaan lokal juga dapat menggerakkan perekonomian desa wisata dengan memberikan program peningkatan kapasitas (Hidayat & Muchtar, 2022). Pada konteks ini, menurut Wijaya dan Sudarmawan (2019), lembaga lokal dapat menyediakan program pelatihan untuk masyarakat lokal yang berminat untuk bekerja pada bidang *hospitality*. Hal ini akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penduduk desa setempat yang nantinya akan bekerja di sebuah perusahaan pariwisata dan akan membuat para wisatawan lebih tertarik untuk meng-*explore* lebih lanjut mengenai desa wisata mereka. Dengan adanya kecakapan pemberian pelayanan *hospitality* oleh karyawan lokal pula, wisatawan cenderung akan merasa senang dan dihormati sehingga membuka potensi untuk turis itu kembali berkunjung lagi atau bahkan merekomendasikannya kepada kerabatnya.

Teori *Community Development Theory* dapat digunakan untuk menganalisis peran kelembagaan lokal dalam penggerakan ekonomi lokal di desa wisata dengan menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Kelembagaan lokal dapat berperan sebagai motor penggerak dalam mengembangkan ekonomi lokal di desa wisata. Mereka dapat membantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal yang ada di desa, memobilisasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi tersebut, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan ekonomi lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori pengembangan masyarakat, kelembagaan lokal dapat membantu menciptakan peluang ekonomi lokal yang berkelanjutan, meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam sektor ekonomi yang relevan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pengembangan desa wisata didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal.

Teori *Community-based Tourism (CBT) Theory* juga relevan dalam menganalisis peran kelembagaan lokal sebagai penggerak ekonomi lokal di desa wisata karena menekankan pada pengembangan pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melindungi warisan budaya. Kelembagaan lokal dapat berperan dalam

mengembangkan dan mengelola sektor pariwisata di desa wisata dengan pendekatan berbasis masyarakat. Mereka dapat membantu membangun produk dan layanan pariwisata yang menggambarkan budaya dan keunikan desa, memasarkan destinasi pariwisata secara efektif, dan memastikan partisipasi dan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori pariwisata berbasis masyarakat, kelembagaan lokal dapat membantu menciptakan ekonomi lokal yang berkelanjutan di desa wisata, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pariwisata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.

Teori *Social Capital Theory* juga memiliki relevansi penting dalam menganalisis peran kelembagaan lokal sebagai penggerak ekonomi lokal di desa wisata karena menyoroti pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial dalam membangun kerjasama dan koordinasi dalam masyarakat. Kelembagaan lokal dapat berperan dalam membangun modal sosial yang diperlukan untuk menggerakkan ekonomi lokal di desa wisata. Mereka dapat memfasilitasi kerjasama antara pelaku ekonomi lokal, membangun kepercayaan, dan membangun norma sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori modal sosial, kelembagaan lokal dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sumber daya antara pelaku ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas kolektif untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan di desa wisata.

## 5. Kelembagaan Lokal sebagai Penyelenggara Pembangunan Ekonomi Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata

Lembaga lokal di Indonesia seperti pemerintah desa, organisasi berbasis masyarakat, dan asosiasi pariwisata telah dibentuk untuk mengelola sumber daya desa wisata secara efektif. Keterlibatan lembaga lokal dalam pengelolaan sumber daya desa wisata dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat (Yulianto, et al, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga lokal dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan

meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal. Namun, pada masa kini, di mana ketersediaan sumber daya terbatas, sangat penting bagi masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang kita miliki secara efisien agar upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lokal tidak sia-sia dan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas lagi.

Salah satu cara untuk pendayagunaan sumber daya desa wisata adalah dengan mengalokasikan sumber daya kepada berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat. Mengalokasikan sumber daya kepada berbagai kelompok dan individu memungkinkan pemanfaatan yang lebih efisien dan optimal. Dalam desa wisata, terdapat beragam jenis sumber daya yang meliputi lahan, air, energi, dan tenaga kerja. Dengan mengalokasikan sumber daya ini kepada berbagai kelompok dan individu, setiap entitas dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan keahlian mereka. Misalnya, kelompok tani dapat mengelola lahan pertanian, kelompok pengrajin dapat menggunakan energi dan bahan baku untuk produksi kerajinan, dan kelompok wisatawan dapat memanfaatkan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat desa. Dengan demikian, setiap kelompok dapat fokus pada penggunaan sumber daya yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Pada konteks pemanfaatan sumber daya desa wisata, alokasi sumber daya dibutuhkan sebagai proses penetapan penggunaan sumber daya pada *project* yang beragam dan tidak hanya pada satu bidang layanan saja. Institusi lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat atau anggota komunitasnya, yang membuat mereka lebih mampu mengalokasikan sumber daya ke tempat yang paling membutuhkan. Misalnya, dari sudut pandang *Social Capital Theory*, lembaga lokal seperti koperasi desa di Lombok dapat mengalokasikan modal kepada pengusaha pengrajin kain Tenun dan juga pada nelayan sekitar lalu bekerja sama dengan Karang Taruna untuk mendesain sebuah teknik marketing yang unik dan kekinian.

Selain itu, peran kelembagaan lokal sebagai koordinator pemanfaatan sumber daya dapat mendorong pembangunan berbasis pariwisata yang berkelanjutan. Keberlanjutan atau *sustainable* adalah kemampuan untuk mempertahankan sumber daya pada tingkat atau laju yang stabil. Lembaga lokal berdiri pada posisi yang tepat untuk mempromosikan keberlanjutan

karena mereka lebih memahami kebutuhan komunitas mereka dan dapat mengidentifikasi cara menggunakan sumber daya yang ramah lingkungan. Misalnya, lembaga lokal dapat mempromosikan penggunaan sumber energi terbarukan di masyarakat, seperti tenaga surya, tenaga angin atau biomassa, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil. Dengan mempromosikan keberlanjutan, institusi lokal dapat memastikan bahwa sumber daya dilestarikan untuk generasi mendatang, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## SIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran kelembagaan lokal dalam mendorong partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan di desa wisata. Dengan pendekatan yang holistik dan inovatif, lembaga-lembaga lokal dapat memainkan peran integral dalam merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa wisata.

Penulis menyoroti tiga peran sentral kelembagaan lokal dalam pemanfaatan sumber daya di desa wisata. Pertama, sebagai pendorong partisipasi masyarakat, kelembagaan lokal mempromosikan inklusi sosial dan menciptakan pengalaman wisata yang otentik. Kedua, sebagai penggerak ekonomi lokal, lembaga-lembaga ini memberdayakan masyarakat melalui program peningkatan kapasitas dan penciptaan lapangan kerja. Terakhir, sebagai penyelenggara pembangunan ekonomi dan promotor pariwisata berkelanjutan, kelembagaan lokal memainkan peran vital dalam mengelola sumber daya secara efektif dan mempromosikan keberlanjutan.

Artikel ini juga menekankan perlunya inovasi dalam pendekatan kelembagaan lokal di desa wisata. Pemanfaatan teknologi, seperti pembuatan situs web dan aplikasi, serta kehadiran di *platform* media sosial, dianggap sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan visibilitas desa. Kolaborasi dengan agen travel untuk pengembangan paket wisata budaya dan tur juga diusulkan, bersama dengan pendekatan proaktif terhadap pengembangan infrastruktur dan pendidikan pariwisata.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam hal merevisi dan menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi Saprudin Darwis sebagai *supervisor* yang telah membimbing dari awal penulisan artikel hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-khaldi, K., & Al-jamal, R. F. (2016). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Education and Practice*, 7(27), 1-10.
- Baccini, L., & Koenig-Archibugi, M. (2014). Why do states commit to international labor standards? Interdependent ratification of core ILO conventions, 1948–2009. *World Politics*, 66(3), 446-490.
- Chigbu, Uchendu Eugene (2014). *Introduction to community development: theory, practice, and service-learning*. *Community Development*, 45(1), 103–104. doi: <https://doi.org/10.1080/15575330.2014.890404>
- Fina, V. M. (2018). PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat). *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*. Vol. 3, No. 2, November 2018: 127-136
- Fink, A. (2014). *Conducting research literature reviews: From the internet to paper*. Sage Publications.
- Gursoy, D., et al. (2018). Residents' impact perceptions of and attitudes towards tourism development: a meta-analysis. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 28(1), 1-28, September 2018.
- Haddow, G., Walters, S., & Carpenter, J. R. (2019). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Hidayat, T., Muchtar, A. (2022). Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Lamajang Kabupaten Bandung dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat. *Tourism Scientific Journal*, STIE YAPARI Bandung. Volume 8 Nomor 1, Desember 2022 (93-104)
- Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Volume 11, No. 2 Desember 2020.
- Kim, M. J., Jang, S. S., & Lee, J. S. (2019). The effect of community-based tourism on empowerment and participation: The case of a tourism village in Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(6), 633-652.
- Kusuma, A. F., Darwanto. (2015). NILAI-NILAI MODAL SOSIAL YANG TERKANDUNG DALAM PERKEMBANGAN PARIWISATA (STUDI KOTA SOLO. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2015. Vol. 22, No. 1, Hal. 65 - 84.
- Maria, G., Darwis, R. (2022). Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran*. September 2022, Hal: 379-385
- Meyer, N., Meyer, D. (2015). The role and impact of tourism on local economic development: A comparative study. *African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance (AJPHRD)* Volume 21(1:1), March 2015, pp. 197-214.
- Mubarok, A. M., et al. (2020). MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PARTISIPASI SOSIAL: Studi Kasus Pembangunan Ekowisata di Desa Mandak. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Volume 9, Issues 2, 137-162.
- MUNA, I. A. (2023). Perlindungan Hukum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pengungsi Akibat Perubahan Iklim: Mekanisme Berdasarkan Piagam.
- Prafitri, Gita Ratri & Damayanti, Maya. (2016). "Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, BANYUMAS)". Semarang: *Jurnal Pengembangan Kota*.
- Prakoso, A. A., Pradipto, E., Roychansyah, M. S., & Nugraha, B. S. (2020). *Community-based Tourism: Concepts, Opportunities*

- and Challenges. Jurnal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship (JoSTE)*, Vol. 2, No. 2, 95-107. Doi: <https://doi.org/10.35912/joste.v2i2.563>
- Purmada, D. K., Wilopo., Hakim, L. (2016). PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF COMMUNITY BASED TOURISM (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 32, No. 2, Maret 2016.
- Putri, S. I., Tou, J. H., & Eriawan, T. (2020) Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengembangan Wisata Budaya di Nagari Pariangan. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa PWK ke-73* Vol. 1 No. 3
- Rahayu, H. A., Istikhomah, I., Fatmawati, N., Usami, R. W., Dari, F. U., & Habib, M. A. F. (2022). Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang. *Greenomika*, 4(1), 31-43.
- Rani, F., & Angraini, D. (2015). *Kerjasama United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dengan Indonesia dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Pangandaran, Jawa Barat Tahun 2011-2013* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rusyidi, B. & Fedyansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1 No. 3, 155-165. Doi: <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>
- Sidiq, A. J., Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Pariwisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1.
- Suryaningsih, O & Nugraha, J. T. (2018). Peran Lembaga Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 1.
- Tanner, T., Surminski, S., Wilkinson, E., Reid, R., Rentschler, J., & Rajput, S. (2015). The triple dividend of resilience: realising development goals through the multiple benefits of disaster risk management.
- Wijaya, N. S., Sudarmawan, I. W. E. (2019). Community Based Tourism (CBT) sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pekraman Tegallalang *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*. Vol. 10 No. 1, Desember 2019; 77-98.
- Yulianto, A., Munawaroh, E., & Prasetyo, B. (2020). Local wisdom-based tourism management model in tourism village. *Journal of Destination Marketing & Management*.